

Judul : Timwas DPR soroti layanan haji Indonesia masih grade D, harusnya bisa grade B
Tanggal : Selasa, 03 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Timwas DPR Soroti Layanan Haji Indonesia Masih *Grade D*, Harusnya Bisa *Grade B*



Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat RDP dan RDPD dengan mitra kerja terkait haji, di Alqimma Hall, Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025).

Anggota Timwas Haji DPR RI Adies Kadir menilai jemaah haji reguler Indonesia seharusnya sudah bisa mendapatkan fasilitas yang setara dengan negara-negara Asia lainnya. Bahkan, mendekati standar layanan haji khusus (ONH Plus) jika manajemen anggaran dilakukan lebih efisien dan terukur.

Pernyataan itu disampaikan Adies yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI dalam RDP dan RDPD dengan mitra kerja terkait haji di Alqimma Hall, Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025). Menurut Adies, fakta yang disampaikan oleh pihak penyelenggara transportasi dan akomodasi Sarikah cukup mengejutkan karena menempatkan jemaah haji reguler Indonesia dalam kategori fasilitas terendah.

"Ada satu hal memang yang cukup membuat kita miris. Ternyata fasilitas haji itu dibagi dalam *grade A, B, C, dan D*. Dan, yang cukup membuat kami agak terpuak, disampaikan bahwa jemaah haji Indonesia adalah yang paling murah dan masuk dalam *grade D*," ungkap politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Pada hal, kata Adies, dengan anggaran dan kemampuan pengelolaan keuangan haji yang dimiliki, seharusnya Indonesia bisa menempatkan jemaahnya pada layanan *grade B* atau bahkan lebih baik.

"Kita ini mampu ke *grade B*. Jemaah reguler itu bisa mendapatkan fasilitas seperti jemaah ONH Plus, seperti *bed sofa*. Mestinya bisa. Dan, mungkin kalau pengelola haji nanti bisa hitung lebih baik, kemungkinan biaya haji itu masih bisa diturunkan, tetapi fasilitas tetap ditingkatkan," tegasnya.

Adies menekankan, hal ini akan menjadi catatan penting bagi evaluasi ke depan, khususnya bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan

Umrah (PHU). Ia meminta agar peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama, bukan sekadar efisiensi anggaran.

"Tahun ini, kita agak toleransi sedikit karena ini baru pertama kali. Tapi, ke depan, ini PR besar kita. Yang penting bukan cari kesalahan, melainkan bagaimana jemaah reguler yang jumlahnya 203.500 orang ini bisa mendapatkan fasilitas yang nyaman selama ibadah haji. Apalagi di puncak ibadah di Aramuza yang paling berat," jelasnya.

Adies menyebut, saat memantau langsung kondisi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, ia merasakan langsung suhu ekstrem yang bisa berdampak pada kesehatan jemaah. Ia meminta agar semua perubahan teknis pelayanan yang telah disepakati tetap menjamin kenyamanan dan tidak menambah beban jemaah.

"Kami minta Dirjen Haji memastikan bahwa jemaah kita mendapatkan pelayanan yang membuat mereka nyaman, bisa ibadah dengan baik, dan tidak stres," ujarnya.

Selain soal akomodasi dan suhu panas ekstrem, Adies juga menyoroti persoalan distribusi makanan dan layanan kesehatan. Ia mengungkap adanya laporan bahwa tenaga kesehatan Indonesia sempat mengalami kendala operasional akibat perizinan yang belum tuntas dari otoritas setempat.

"Ada laporan bahwa petugas medis kita seperti diuber-uber polisi lokal karena tidak punya izin. Yang ingin dirawat pun terpaksa sembunyi-sembunyi dari lorong ke lorong. Ini tentu harus jadi perhatian agar tidak terulang," katanya.

Adies kembali menekankan pentingnya koordinasi dan tindak lanjut dari seluruh tim pengawasan serta kementerian terkait agar seluruh layanan saat puncak ibadah dapat berjalan maksimal. [1]